

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat bersifat fluktuatif. Tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon dengan tingkat kemiskinan diatas 14%. Sedangkan, tingkat kemiskinan yang tergolong rendah yaitu Kota Depok, Kota Bandung, dan Kota Bekasi dengan tingkat kemiskinan dibawah 4%. Bantuan sosial yang dikeluarkan setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sangatlah tidak merata. Belanja bantuan sosial yang tergolong tinggi dikeluarkan oleh Kabupaten Karawang dan kota Bekasi dengan pengeluaran diatas 150 miliar. Sedangkan, bantuan sosial yang tergolong rendah dikeluarkan oleh Kota Bogor sebesar 29 miliar.
2. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 – 2023. Dengan kata lain, peningkatan belanja bantuan sosial berkontribusi terhadap perubahan tingkat kemiskinan pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

5.2 Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel belanja bantuan sosial berpengaruh terhadap kemiskinan. Artinya teori Keynesian dan teori redistribusi pendapatan dari Richard A. Musgrave berlaku dalam penelitian yang dilakukan pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bisa berpengaruh dikarenakan bantuan sosial dapat mendorong daya beli masyarakat miskin, meningkatkan konsumsi dan pada akhirnya memperkuat aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

5.3 Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil temuan bahwa beras merupakan komoditas dengan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan makanan, maka pemerintah perlu merancang kebijakan bantuan sosial yang secara strategis menjamin keterjangkauan dan ketersediaan beras bagi masyarakat miskin dan rentan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengoptimalkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako, di mana beras harus dijadikan komponen utama yang wajib tersedia dan terjamin kualitasnya dalam paket bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di samping itu, pemerintah juga perlu memberlakukan subsidi harga beras secara lebih terarah (*targeted*), yaitu melalui mekanisme subsidi tertutup yang hanya dapat diakses oleh rumah tangga miskin dengan menggunakan sistem kupon atau *e-voucher* yang terintegrasi dengan data DTKS. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap komoditas utama tersebut, terutama di tengah fluktuasi harga pangan yang cenderung meningkat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas distribusi bantuan, pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring harga dan distribusi beras secara *real-time*, agar dapat melakukan intervensi secara cepat dan tepat sasaran bila terjadi gejolak harga. Seluruh proses distribusi bansos, terutama yang berbasis komoditas beras, perlu dilakukan secara digital dan transparan, dengan memanfaatkan teknologi *e-voucher* atau aplikasi yang terhubung langsung dengan data resmi penerima manfaat. Dengan strategi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data ini, diharapkan bantuan sosial yang disalurkan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan dan memperkuat keadilan distributif sebagaimana yang diteorikan oleh Richard A. Musgrave.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau perbandingan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan teori redistribusi pendapatan dari Richard A. Musgrave yaitu variabel pajak progresif yang belum diteliti saat ini. Kemudian, terkait cakupan wilayah bisa diperluas untuk mengetahui pengaruh belanja bantuan sosial dalam konteks geografis yang lebih luas. Selain itu, direkomendasikan pula untuk mengkaji efektivitas dari jenis program bantuan sosial tertentu seperti PKH, BPNT, atau BLT agar hasil penelitian dapat lebih aplikatif dan bermanfaat bagi penyusunan kebijakan yang lebih spesifik.